

Inpres 2/2023: Jokowi Minta Menteri Tindak Lanjuti Rekomendasi Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Inpres itu diterbitkan per tanggal 15 Maret 2023. Dalam instruksinya, Jokowi memerintahkan 19 menteri dan lembaga negara, yaitu Menkopolkam, Menko PMK, Mendagri, Menlu, Menag, Menkumham, Menkeu, Mendikbudristek, Menkes, Mensos, Menaker, Menteri PUPR, Mentan, Menteri BUMN, Menkop UKM, Menparekraf, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi TIM PPHAM," berikut bunyi Inpres sebagaimana dikutip dari situs JDIH Setneg, Kamis (16/3). Ada dua langkah yang harus dilakukan 19 kementerian dan lembaga, yang pertama memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. Setiap kementerian dan lembaga pun mendapat instruksi yang spesifik dari Jokowi. Seperti Kapolri yang diminta mengambil langkah komprehensif menjaga keamanan dan melakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM. Sementara Jaksa Agung diminta untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat dan melakukan pendampingan pada saat verifikasi data korban. Sebelumnya, Jokowi telah menerima laporan tim PPAHAM terkait dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi pun meminta maaf atas keberadaan pelanggaran HAM berat tersebut. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/1).